PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan “Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025” dimana kami telah berupaya sedapat mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Padang Panjang melalui Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah daerah mutlak dilakukan karena merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Oleh sebab itu, maka Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Iklim Investasi yang Kondusif , Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja yang Maju, Mandiri dan Islami”. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Semoga Allah SWT memberkahi usaha yang telah kita laksanakan ini.

Padang Panjang, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA,SSTP,M.M
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL 1
DAFTAR GAMBAR 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1. LATAR BELAKANG 3
1.2. LANDASAN HUKUM 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II 9
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2018-2023 9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 26
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 30
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 37
2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 48
BAB III 51
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 51
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 65
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 65
BAB IV 72
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 72
BAB V 77
PENUTUP 77

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 1
Tabel 2 2 1
Tabel 2 3 1
Tabel 2 4 1
Tabel 2 5 1
Tabel 2 6 1
Tabel 2 7 1

Tabel 3. 1 1
Tabel 3. 2 1
Tabel 3. 3 1
Tabel 3. 4 1
Tabel 3. 5 1
Tabel 3. 6 1
Tabel 3. 7 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 i
Gambar 1. 2 1

Gambar 2. 1 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada BAB I Pasal 1 angka 30 dinyatakan bahwa :

> " Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. "

Rencana Kerja Perangkat Daerah tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : Dalam Pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Kemudian dalam Pasal 127 dijelaskan bahwa berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala

Daerah tentang penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi rancangan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah pelaksanaan program/kegiatan Renstra tahun ke-2. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang akhirnya akan menjadi pedoman/bahan dalam proses penyusunan RAPBD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
   Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :

a. Pengolahan data dan informasi
b. Analisis gambaran pelayanan OPD
c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
f. Perumusan tujuan dan sasaran
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
h. Perumusan kegiatan prioritas
i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
k. Pembahasan forum OPD

3. Penyusunan rancangan

Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Disporapar Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Disporapar.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

Gambar 1. 1
Tahapan Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Padang Panjang

Berdasarkan ketentuan diatas, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk satu (1) Tahun Anggaran yang berisikan penjabaran dari Visi, Misi, Prioritas dan Sasaran pembangunan untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Padang Panjang disusun dengan melibatkan semua pihak terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang diserahi sebagian kewenangan oleh Walikota untuk menangani Penyelenggaraan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1. 2
Tahapan Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Padang Panjang

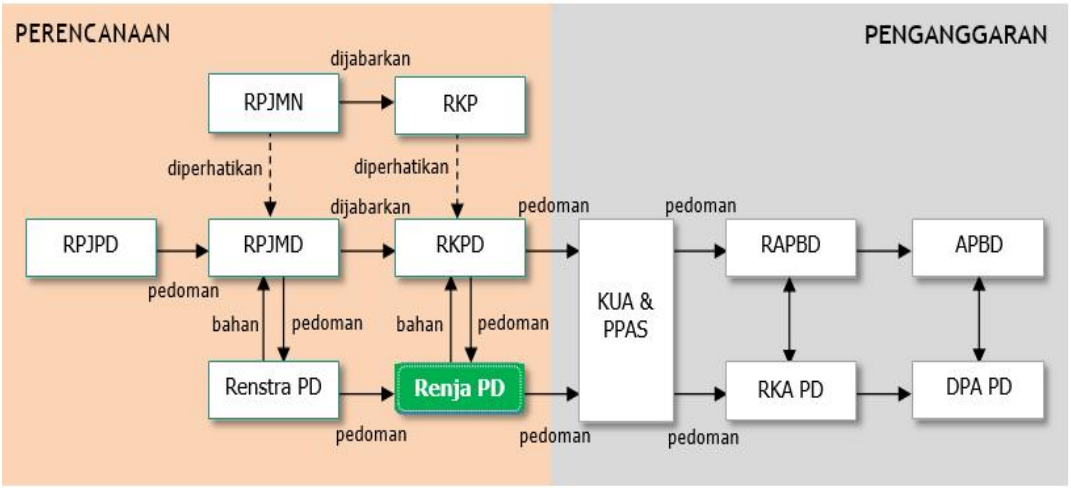

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
h. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
j. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
l. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

n. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
o. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
q. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang; Peraturan Walikota
r. Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
s. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Untuk menjamin keterkaitan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanan, dan pengawasan.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana KerjaPerangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program dan Kegiatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2018-2023

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Prakiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 Sampai Dengan Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tahun lalu (Tahun 2024) pada umumnya telah dapat terlaksana dengan baik dengan rata-rata capaian kinerja 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2 1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 (Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023)

Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DPMPTSP									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**Rp3.608.751.225**	**Rp 3.100.547.387**	**Rp 3.608.751.225**	**Rp 3.485.897.633**	**96,60%**	**Rp 3.180.171.772**	**Rp 3.180.171.772**	100,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan keuangan perangkat daerah**	**Rp2.866.625.750**	**Rp 2.569.761.020**	**Rp 2.866.625.750**	**Rp 2.784.073.478**	**97,12%**	**Rp 2.869.322.222**	**Rp 2.869.322.222**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.866.625.750	Rp 2.569.761.020	Rp 2.866.625.750	Rp 2.784.073.478	97,12%	Rp 2.869.322.222	**Rp 2.869.322.222**	100,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi perangkat daerah**	Rp -	Rp -	Rp -	**Rp -**	0,00%	**Rp 11.500.000**	**Rp 11.500.000**	100,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp 11.500.000	**Rp 11.500.000**	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	**Persentase pemenuhan pelayanan adminitrasi**	**Rp 378.724.712**	**Rp 213.044.748**	**Rp 378.724.712**	**Rp 371.599.492**	**98,12%**	Rp 253.774.550	**Rp 253.774.550**	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah	**perkantoran**								
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 2.623.911	Rp 6.005.000	Rp 2.623.911	Rp 2.382.100	90,78%	Rp 2.994.000	**Rp 2.994.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 33.683.600	Rp 33.791.500	Rp 33.683.600	Rp 33.579.600	99,69%	Rp 39.005.000	**Rp 39.005.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 30.930.500	Rp 17.721.200	Rp 30.930.500	Rp 26.099.500	84,38%	Rp 32.208.250	**Rp 32.208.250**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 304.472.401	Rp 142.033.248	Rp 304.472.401	Rp 303.390.392	99,64%	Rp 169.570.000	**Rp 169.570.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 7.014.300	Rp 13.493.800	Rp 7.014.300	Rp 6.147.900	87,65%	Rp 9.997.300	**Rp 9.997.300**	100,00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	**0,00%**	**Rp -**	**Rp -**	0,00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -	**Rp -**	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**Rp 195.793.473**	**Rp 169.765.719**	**Rp 195.793.473**	**Rp 170.265.954**	**86,96%**	**Rp 192.117.800**	**Rp192.117.800**	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.000.000	Rp 250	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	33,33%	Rp 2.999.600	**Rp 2.999.600**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 49.999.590	Rp 34.434.406	Rp 49.999.590	Rp 34.685.592	69,37%	Rp 45.575.000	**Rp 45.575.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 142.793.883	Rp 135.331.063	Rp 142.793.883	Rp 134.580.362	94,25%	Rp 143.543.200	**Rp143.543.200**	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara**	**Rp 167.607.290**	**Rp 147.975.900**	**Rp 167.607.290**	**Rp 159.958.709**	**95,44%**	**Rp 472.074.600**	**Rp472.074.600**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 102.487.290	Rp 102.602.200	Rp 102.487.290	Rp 97.288.900	94,93%	Rp 112.946.600	**Rp112.946.600**	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 25.120.000	Rp 15.515.000	Rp 25.120.000	Rp 23.350.000	92,95%	Rp 29.280.000	**Rp 29.280.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 40.000.000	Rp 29.858.700	Rp 40.000.000	Rp 39.319.809	98,30%	Rp 329.848.000	**Rp329.848.000**	100,00%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang dilatih**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 459.552.023,00**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 165.897.394,00**	**83,66%**	**Rp 337.382.600**	**Rp337.382.600**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEGIATAN : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	**Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 459.552.023,00**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 165.897.394,00**	**83,66%**	**Rp 337.382.600**	**Rp337.382.600**	100%
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp 127.514.400,00	Rp 60.582.561,00	Rp 127.514.400,00	Rp 117.777.698,00	92,36%	Rp 162.397.000	**Rp162.397.000**	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Rp 70.789.150,00	Rp 398.969.462,00	Rp 70.789.150,00	Rp 48.119.696,00	67,98%	Rp 174.985.600	**Rp174.985.600**	100%
	PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		**0,00%**	**Rp 224.998.400**	**Rp224.998.400**	100%
	KEGIATAN : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penambahankesempatan kerja**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		**0,00%**	**Rp 224.998.400**	**Rp224.998.400**	100%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Rp -	Rp -	Rp -		0,00%	Rp 24.998.400	**Rp 24.998.400**	100%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -		0,00%	Rp 200.000.000	**Rp200.000.000**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEGIATAN : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		**0,00%**	Rp 99.999.000	**Rp 99.999.000**	100%
	Sub Kegiatan Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Rp -	Rp -	Rp -		0,00%	Rp 99.999.000	**Rp 99.999.000**	100%
	PPROGRAM :HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif**	**Rp 740.174.400,00**	**Rp 376.917.800,00**	**Rp 740.174.400,00**		**0,00%**	**Rp1.487.013.450**	**Rp 1.487.013.450**	100%
	KEGIATAN : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan**	**Rp 740.174.400,00**	**Rp 376.917.800,00**	**Rp 740.174.400,00**		**0,00%**	**Rp1.487.013.450**	**Rp 1.487.013.450**	100%
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Rp -	Rp -	Rp -		#DIV/0!	Rp 29.999.850	**Rp 29.999.850**	100%
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp 740.174.400,00	Rp 376.917.800,00	Rp 740.174.400,00		0,00%	Rp1.457.013.600	**Rp 1.457.013.600**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Nilai Investasi per tahun**	**Rp -**		**Rp -**	**Rp -**	**0,00%**	**Rp 29.974.000**	**Rp 29.974.000**	100%
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	Rp 29.974.000	**Rp 29.974.000**	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 29.974.000	**Rp 29.974.000**	100%
	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	**Rp 573.882.651**	**Rp573.882.651**	100%
	KEGIATAN :Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 573.882.651	**Rp573.882.651**	100%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 87.200.000	**Rp 87.200.000**	100%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 312.276.651	**Rp312.276.651**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 174.406.000	**Rp174.406.000**	100%
	PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	**Rp 140.488.500**	**Rp140.488.500**	100%
	KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	Rp 140.488.500	**Rp140.488.500**	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 14.996.000	**Rp 14.996.000**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 100.693.800	**Rp100.693.800**	100%
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yangmendapat pemantauan,analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risikoLintas DaerahKabupaten/Kota bagiKegiatan Usaha Dari PelakuUsaha	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 24.798.700	**Rp 24.798.700**	100%

Tabel 2 2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024
(Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026)
Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DPMPTSP									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**Rp3.608.751.225**	**Rp 3.100.547.387**	**Rp 3.608.751.225**	**Rp 3.485.897.633**	**96,60%**	**Rp 3.180.171.772**	**Rp 3.180.171.772**	100,00%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan keuangan perangkat daerah**	**Rp2.866.625.750**	**Rp 2.569.761.020**	**Rp 2.866.625.750**	**Rp 2.784.073.478**	**97,12%**	**Rp 2.869.322.222**	**Rp 2.869.322.222**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.866.625.750	Rp 2.569.761.020	Rp 2.866.625.750	Rp 2.784.073.478	97,12%	Rp 2.869.322.222	**Rp 2.869.322.222**	100,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi perangkat daerah**	Rp -	Rp -	Rp -	**Rp -**	0,00%	**Rp 11.500.000**	**Rp 11.500.000**	100,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp 11.500.000	**Rp 11.500.000**	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan adminitrasi perkantoran**	**Rp 378.724.712**	**Rp 213.044.748**	**Rp 378.724.712**	**Rp 371.599.492**	**98,12%**	Rp 253.774.550	**Rp 253.774.550**	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 2.623.911	Rp 6.005.000	Rp 2.623.911	Rp 2.382.100	90,78%	Rp 2.994.000	**Rp 2.994.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 33.683.600	Rp 33.791.500	Rp 33.683.600	Rp 33.579.600	99,69%	Rp 39.005.000	**Rp 39.005.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 30.930.500	Rp 17.721.200	Rp 30.930.500	Rp 26.099.500	84,38%	Rp 32.208.250	**Rp 32.208.250**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 304.472.401	Rp 142.033.248	Rp 304.472.401	Rp 303.390.392	99,64%	Rp 169.570.000	**Rp 169.570.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 7.014.300	Rp 13.493.800	Rp 7.014.300	Rp 6.147.900	87,65%	Rp 9.997.300	**Rp 9.997.300**	100,00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	**0,00%**	**Rp -**	**Rp -**	0,00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -	**Rp -**	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**Rp 195.793.473**	**Rp 169.765.719**	**Rp 195.793.473**	**Rp 170.265.954**	**86,96%**	**Rp 192.117.800**	**Rp192.117.800**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 3.000.000	Rp 250	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	33,33%	Rp 2.999.600	**Rp 2.999.600**	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 49.999.590	Rp 34.434.406	Rp 49.999.590	Rp 34.685.592	69,37%	Rp 45.575.000	**Rp 45.575.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 142.793.883	Rp 135.331.063	Rp 142.793.883	Rp 134.580.362	94,25%	Rp 143.543.200	**Rp143.543.200**	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara**	**Rp 167.607.290**	**Rp 147.975.900**	**Rp 167.607.290**	**Rp 159.958.709**	**95,44%**	**Rp 472.074.600**	**Rp472.074.600**	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 102.487.290	Rp 102.602.200	Rp 102.487.290	Rp 97.288.900	94,93%	Rp 112.946.600	**Rp112.946.600**	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 25.120.000	Rp 15.515.000	Rp 25.120.000	Rp 23.350.000	92,95%	Rp 29.280.000	**Rp 29.280.000**	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 40.000.000	Rp 29.858.700	Rp 40.000.000	Rp 39.319.809	98,30%	Rp 329.848.000	**Rp329.848.000**	100,00%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang dilatih**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 459.552.023,00**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 165.897.394,00**	**83,66%**	**Rp 337.382.600**	**Rp337.382.600**	100%
	KEGIATAN : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	**Jumlah pelatihan berbasis komputer yang dilaksanakan**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 459.552.023,00**	**Rp 198.303.550,00**	**Rp 165.897.394,00**	**83,66%**	**Rp 337.382.600**	**Rp337.382.600**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Rp 127.514.400,00	Rp 60.582.561,00	Rp 127.514.400,00	Rp 117.777.698,00	92,36%	Rp 162.397.000	**Rp162.397.000**	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Rp 70.789.150,00	Rp 398.969.462,00	Rp 70.789.150,00	Rp 48.119.696,00	67,98%	Rp 174.985.600	**Rp174.985.600**	100%
	PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		**0,00%**	**Rp 224.998.400**	**Rp224.998.400**	100%
	KEGIATAN : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah penambahankesempatan kerja**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		**0,00%**	**Rp 224.998.400**	**Rp224.998.400**	100%
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Rp -	Rp -	Rp -		0,00%	Rp 24.998.400	**Rp 24.998.400**	100%
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Rp -	Rp -	Rp -		0,00%	Rp 200.000.000	**Rp200.000.000**	100%
	KEGIATAN : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		**0,00%**	Rp 99.999.000	**Rp 99.999.000**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Rp -	Rp -	Rp -		0,00%	Rp 99.999.000	**Rp 99.999.000**	100%
	PPROGRAM :HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif**	**Rp 740.174.400,00**	**Rp 376.917.800,00**	**Rp 740.174.400,00**		**0,00%**	**Rp1.487.013.450**	**Rp 1.487.013.450**	100%
	KEGIATAN : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan**	**Rp 740.174.400,00**	**Rp 376.917.800,00**	**Rp 740.174.400,00**		**0,00%**	**Rp1.487.013.450**	**Rp 1.487.013.450**	100%
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Rp -	Rp -	Rp -		#DIV/0!	Rp 29.999.850	**Rp 29.999.850**	100%
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Rp 740.174.400,00	Rp 376.917.800,00	Rp 740.174.400,00		0,00%	Rp1.457.013.600	**Rp 1.457.013.600**	100%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Nilai Investasi per tahun**	**Rp -**		**Rp -**	**Rp -**	**0,00%**	**Rp 29.974.000**	**Rp 29.974.000**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	Rp 29.974.000	**Rp 29.974.000**	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 29.974.000	**Rp 29.974.000**	100%
	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	**Rp 573.882.651**	**Rp573.882.651**	100%
	KEGIATAN :Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 573.882.651	**Rp573.882.651**	100%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 87.200.000	**Rp 87.200.000**	100%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 312.276.651	**Rp312.276.651**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 174.406.000	**Rp174.406.000**	100%
	PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	**Rp 140.488.500**	**Rp140.488.500**	100%
	KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	Rp -		Rp -	Rp -	**0,00%**	Rp 140.488.500	**Rp140.488.500**	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 14.996.000	**Rp 14.996.000**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 100.693.800	**Rp100.693.800**	100%
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yangmendapat pemantauan,analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risikoLintas DaerahKabupaten/Kota bagiKegiatan Usaha Dari PelakuUsaha	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	Rp 24.798.700	**Rp 24.798.700**	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 dan 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yaitu :

a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (64,39%). Biaya fotocopy cukup banyak bersisa, hal karena kita pemanfaatan aplikasi e-office dan srikandi yang meminimalkan pemanfaatan kertas, dan biaya cetak dan jilid sesuai kebutuhan karena sebagian besar dokumen tersedia dalam bentuk softcopy.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (63,08%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan air ke PDAM dan tagihan listrik ke PLN, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air dan listrik per bulannya.

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (68,99%). Sub kegiatan ini melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD/RPD Kota Padang Panjang setiap tahun perode RPJMD/RPD berjalan, dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara triwulan. Untuk melihat singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Sisa anggaran berupa belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.1.291.500,- yang direncanakan untuk rapat evaluasi di bulan Desember namun karena keterbatasan waktu tidak dilaksanakan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan bahwa fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2 3

Pencapaian Klinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
T	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar, kecil dan eceran			*5,69%*	*5,92%*			*5,69%*	*5,92%*			
S	Nilai investasi			30M	35M			30M	35M			
T	Tingkat Pengangguran Terbuka			*4,59%*	*4,47%*			*4,59%*	*4,47%*			
S	Persentase peserta pelatihan yang ditempatkan			45%	50%			45%	50%			
T	Indeks Kepuasan Masyarakat			*81*	*82*			*81*	*82*			
S	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	88			87	88			
IP	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%			100%	100%			
IP	persentase pencari kerja yang dilatih			1,96%	2,29%			1,96%	2,29%			
IP	jumlah penambahan kesempatan kerja			535 orang	551 orang			535 orang	551 orang			
IP	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif			32,18%	42,61%			32,18%	42,61%			
IP	Jumlah Investor Terdaftar			25 Investor	28 Investor			25 Investor	28 Investor			
IP	Nilai Investasi			85 M	100M			85 M	100M			
IP	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP			90%	100%			90%	100%			

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
IP	Tingkat Kepatuhan Perusahaan			100%	100%			100%	100%			
RENSTRA 2024-2026												
T	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik					*93*	*95*			*93*	*95*	
S	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					96,87	96,88			96,87	96,88	
IP	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah					97,87	96,88			97,87	96,88	
T	Tingkat Pengangguran					*4,72%*	*4,61%*			*4,72%*	*4,61%*	
S	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja					64,05%	64,07 %			64,05 %	64,07 %	
IP	Persentase pencari kerja yang dilatih					0,32%	0,32%			0,32%	0,32%	
IP	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)					0,04%	0,08%			0,04%	0,08%	
IP	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah					100%	100%			100%	100%	
T	Angka Kemiskinan					*4,99%*	*4,85%*			*4,99%*	*4,85%*	
S	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin					2,50%	2,78%			2,50%	2,78%	
IP	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif					32%	32%			32%	32%	
T	Persentase kenaikan investasi					*6%*	*6%*			*6%*	*6%*	
S	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)					22	24			22	24	

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal					-	12%			-	12%	
	Nilai Investasi per tahun					35M	37M			35M	37M	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami beberapa perubahan pada Renstra 2018-2023 dan Renstra 2024-2026.
2. Pada Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:
    a. Tujuan “Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan” dengan indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar, kecil dan eceran” dengan realisasi Tahun 2022 5,69% dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023menjadi 5,92%.
    b. Tujuan “Menurunnya Tingkat Pengangguran” dengan indikator :Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan realiasi Tahun 2022 4,59% namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 4,47%.
    c. Tujuan “Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan realiasi Tahun 2022 81 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 82.
3. Pada Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 4 (empat) tujuan sebagai berikut:
    a. Tujuan “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan indikator “Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 adalah 93 dan 95.
    b. Tujuan “Menurunkan tingkat pengangguran” dengan indikator “Tingkat Pengangguran” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 yatu 4,72% dan 4,61%.
    c. Tujuan “Menurunkan Angka Kemiskinan” dengan indikator “Angka Kemiskinan” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 yaitu 4,99% dan 4,85%.
    d. Tujuan “Meningkatkan Nilai Investasi” dengan indikator “Persentase kenaikan investasi” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 dengan target sama Tahun 2024 2025 yaitu 6%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

   Dalam rangka operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang harus ditindaklanjuti yaitu :

   a. Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
   b. Kurang optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan oleh Perangkat Daerah teknis/ Instansi terkait.
   c. Masyarakat/ pelaku usaha masih enggan untuk pengurusan perizinan.
   d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang pengurusan perizinan dan non perizinan.
   e. Kurang optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah terkait di dalam menjalankan dan menegakkan Perda.
   f. Masih rendahnya keterampilan SDM Aparatur dalam mengadopsi dan menjalankan jaringan / mengakses aplikasi Teknologi Informasi di dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan publik.
   g. Belum adanya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang representatif untuk sebuah pelayanan yang profesional.

2. Permasalahan dan Hambatan yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

   Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya adalah:

   A. Urusan Penanaman Modal

      Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

      1) Belum optmalnya informasi peluang penanaman modal kepada investor
      2) Belum optimalnya promosi penanaman modal yang massif dan tepat sasaran
      3) Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

   B. Urusan Tenaga Kerja

      Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

1) Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
2) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah.
3) Kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam operasionalnya ditantang untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat merubah image masyarakat terhadap pelayanan yang berbelit-belit serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi tantangan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Melaksanakan kajian terhadap peluang investasi
2) Melaksanakan promosi secara massif dan tepat sasaran
3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Investasi Penanaman Modal
5) Melaksanakan Fasilitasi kemudahan investasi
6) Melaksanakan pendataan tenaga kerja dan kesempatan kerja
7) Melaksanakan Sosialisasi penempatan tenaga kerja
8) Peningkatan hubungan industrial, koordinasi dengan pengusaha dan pekerja .
9) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan
10) Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
11) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
12) Menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 4

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	**Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah**	Belum optimalnya kinerja pelayanan perizinan terpadu	Masih belum optimalnya sosialisasi terhadap perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
2	**Masih tingginya angka pengangguran**	Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja	Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja
			Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah
			Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
3	**Masih tingginya angka kemiskinan**	Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja
4	**Belum optimalnya capaian nilai investasi**	Belum optimalnya peluang investasi yang ada	Belum adanya informasi peluang penanaman modal yang mendetail dan akurat
			Belum terlaksananya promosi penanaman modal yang masif dan tepat sasaran
			Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

Gambar 2. 1
Pohon Masalah DPMPTSP Kota Padang Panjang

Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2 5

Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatanan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaran layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruturdan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang adalah dengan Peningkatan nilai investasi dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang Panjang terkait Peningkatan daya saing ekonomi daerah terkait dan Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik terkait Peningkatan tata kelola kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah
b. Masih tingginya angka pengangguran
c. Masih tingginya angka kemiskinan
d. Belum optimalnya capaian nilai investasi

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Disporapar disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2 6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**4.232.909.740**					**5.789.992.647**	**1.557.082.907**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**4.232.909.740**					**5.789.992.647**	**1.557.082.907**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**3.974.509.740**					**5.589.992.197**	**1.615.482.457**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100%**	**3.068.400.540**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100%**	**3.844.871.197**	**776.470.657**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.415.293.540**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	**2.920.701.197**	**505.407.657**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 orang/bulan	2.415.293.540	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 orang/bulan	2.920.701.197	505.407.657	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**-**	**-**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	-	**-**	**-**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**300.000.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	**306.000.000**	**6.000.000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.000.000	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	33.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	39.000.000	6.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	34.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	34.000.000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	220.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	220.000.000	-	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	10.000.000	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**20.000.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	**20.000.000**	**-**	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	20.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	20.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**177.848.000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	**433.000.000**	**255.152.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	50.000.000	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	124.848.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	380.000.000	255.152.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**155.259.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	**165.170.000**	**9.911.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	32.170.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	32.170.000	-	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	-	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	103.089.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	113.000.000	9.911.000	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase Pencari kerja yang Dilatih**	**0,40%**	**331.109.200**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase Pencari kerja yang Dilatih**	**0,40%**	**297.000.000**	**(34.109.200)**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100%**	**331.109.200**	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100%	**297.000.000**	**(34.109.200)**	
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 orang	156.109.200	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 orang	162.000.000	5.890.800	
	Sub Kegiataan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 lembaga	175.000.000	Sub Kegiataan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	135.000.000	(40.000.000)	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**0,08%**	**325.000.000**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**0,08%**	**290.000.000**	**(35.000.000)**	
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota**	**100%**	**225.000.000**	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	100%	**175.000.000**	**(50.000.000)**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 orang	25.000.000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 orang	25.000.000	-	
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	200.000.000	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 orang	150.000.000	(50.000.000)	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Jumlah job fair yang dilaksanakan**	**1 job fair**	**100.000.000**	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah job fair yang dilaksanakan	1 job fair	**115.000.000**	**15.000.000**	
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	30 orang	100.000.000	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	30 orang	115.000.000	15.000.000	
	Program Hubungan Industrial	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif**	**32%**	**250.000.000**	**Program Hubungan Industrial**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif**	**32%**	**1.158.121.000**	**908.121.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	**100%**	**250.000.000**	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	**1.158.121.000**	**908.121.000**	
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	8000 orang	250.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	8000 orang	1.158.121.000	908.121.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**258.400.000**					**200.000.450**	**(58.399.550)**	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	**96,88%**	**108.400.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	**96,88%**	**50.000.000**	**(58.400.000)**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**		
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	**97%**	**108.400.000**	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	**97%**	**50.000.000**	**(58.400.000)**	
	Sub Kegiatan 'Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	15.000.000	Sub Kegiatan 'Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	15.000.000	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	68.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	10.000.000	(58.400.000)	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	25.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	25.000.000	-	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal**	**12%**	**75.000.000**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal**	**12%**	**75.000.450**	**450**	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi**	**1 dokumen**	***75.000.000***	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi	1 dokumen	***75.000.450***	***450***	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.450	450	
	Program Promosi Penanaman Modal	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Nilai Investasi per tahun**	**37,000,000,000 Rupiah**	**75.000.000**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG**	**Nilai Investasi per tahun**	**37,000,000,000 Rupiah**	**75.000.000**	**-**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	**Jumlah promosi yang dilaksanakan**	**2 dokumen**	**75.000.000**	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 dokumen	**75.000.000**	**-**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP KOTA PADANG PANJANG	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	75.000.000	-	

2.5. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

Dari hasil Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan, terdapat beberapa usulan yang berkaitan dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Silaing Atas, Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	3 orang	20.000.000	Usulan Pelatihan Calon Pencari Kerja (Pelatihan Satpam) Kelurahan Silaing Atas Prioritas 2
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	18 orang	120.000.000	Usulan Pelatihan Calon Pencari Kerja (Pelatihan Satpam) Kelurahan Tanah Hitam Prioritas 2
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	5 orang	31.250.000	Usulan Pelatihan Calon Pencari Kerja (Pelatihan Satpam) Kelurahan Kampung Manggis Prioritas 2
	Jumlah				**171.250.000**	

Keterangan Tabel:

Dari hasil penjaringan usulan yang dilakukan dari tingkat kelurahan maka terdapat 3 (tiga) usulan dari 3 (tiga) kelurahan yang berkaitan dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yaitu Pelatihan Satpam. Usulan ini berkaitan dengan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan masuk dalam program Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan total anggaran usulan sebesar Rp 171.250.000. Ketiga usulan merupakan usulan prioritas 2 yang berasal dari Kelurahan Silaing Atas, Kelurahan Tanah Hitam, Dann Kelurahan Kampung Manggis.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik mencakup dua hal pokok yaitu Pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa PTSP Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan .

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka sudah seharusnya kita melaksanakan seluruh jenis pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, artinya seluruh perizinan yang ada di Kota Padang Panjang harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sebagaimana kita sadari bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara dan konsekuensi logis bahwa pemerintah dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas adalah pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi :

a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.

Sistem pelayanan terpadu merupakan langkah strategis dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Padang Panjang secara keseluruhan dan juga dapat mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dengan menitik beratkan bahwa pelayanan perizinan tidak dilihat dalam konteks kemudahan prosedural administrasi saja akan tetapi juga meliputi kualitas pelayanan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Untuk itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, yang merupakan tahap ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Visi ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.** Sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi yakni;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tabel 3. 1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan

Misi	Tujuan	Sasaran
berkelanjutan	dan merata	Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi

yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	**Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing**			**Indeks Pembangunan Manusia**	**78,78**	**78,97**	**79,02**	**79,38**	**79,73**	**79,73**
		1	Meningkatnya kualitas pendidikanmasyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saingk kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**59,40**	**56,42**	**57,62**	**58,82**	**60,02**	**60,02**
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
3	**Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,39**	**4,79**	**5,20**	**5,60**	**6,00**	**6,00**
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektorPerdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	**Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**			**Indeks Rasa Aman**	**Aman (86,04)**	**Aman (86,20)**	**Aman (86,39)**	**Aman (89,09)**	**Aman (91,78)**	**Aman (91,78)**
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30
5	**Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas**			**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**90,96**	**91,16**	**91,36**	**91,56**	**91,76**	**91,76**
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**66,61**	**66,80**	**67-68**	**66,76**	**69-70**	**69-70**
		13	Terbangunnya	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
			Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Disporapar berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD, ada 2 (dua) tujuan yang diambil dari RPD yaitu Tujuan 1 (satu) : **"Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing",** Indikatornya Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan, dengan 2 (dua) indikator yang akan dicapai: 1. Status Kota Layak Pemuda, 2. Rasio daya saing keolahragaan. Tujuan 3 (tiga) : **"Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dengan penurunan ketimpangan"**, Indikatornya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis kepemudaan,olahraga dan pariwisata, Disporapar Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek kepemudaan, olahraga dan aspek pariwisata dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4 Telaahan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

a. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 3. 3
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra DPMPTSP Provinsi Sumbar
Tahun 2021-2026

No	Permasalahan	Isu strategis	Tujuan 2021-2026
1	Belum semua penerbitan izin sesuai Dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	Regulasi yang berlum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.	Meningkatnya Kinerja Organisasi
2	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai	Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
3	Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian	Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat	

	dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik	diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.	
4	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM.	Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan*, *feasibility study*, DED, dan *business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.	
5	Rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan rencana investasi	Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten	

b. **Sasaran Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Untuk mewujudkan visi misi tersebut di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran antara lain:

Tabel 3. 4
Sasaran Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2025
1.	Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	

		PMA (ribu US)	6.779.050
		PMDN (juta Rp)	187.000
		TOTAL (Juta Rp)	4.086.250
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	Indeks Kepuasan Msayarakat (IKM)	83.5 / 3.45
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80.69)

2. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

a. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 3. 5
Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

No	Permasalahan	Isu strategis	Tujuan 2021-2026
1	Rendahnya kompetensi angkatan kerja	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
2	Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas pelayanan pelatihan kerja belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas serta kecukupan pendidik (instruktur) produktif berkualitas	
3	Belum optimalnya keharmonisan hubungan industrial	Percepatan transformasi digitalisasi yang berpengaruh terhadap pola kerja.	
4	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi	Salah satu aspek penting dalam penguatan daya saing ekonomi	

		adalah kondusifnya iklim ketenagakerjaan yang didukung oleh harmonisnya hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.	
5	Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi	Kawasan transmigrasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan wilayah.	

b. Sasaran Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

Selanjutnya untuk mewujudkan visi misi di bidang ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 6

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Meningkatnya daya saing angkatan kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Indeks	8.57	8,60	8,62
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36.04	36,34	36,68
	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja	%	36.50	36,99	37,97
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaa	%	74,42	84,32	91,14
Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah		Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi (IPSP Trans)	Indeks	76.10	77,00	79,00
	Meningkatnya status perkembangan satuan permukiman transmigrasi	Indeks perkembangan satuan pemukiman transmigrasi (IPSP)	Indeks	42.00	6,00	51,00
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani		Nilai SAKIP (Predikat)	Nilai	BB	BB	A
		Rata-rata tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal	%	83.33	85	86,67

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
		organisasi				
	Meningkatnya akuntablitas kinerja organisasi	Nilai evaluasi kinerja	%	14.75	15,25	15,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan umum	%	90	90	90
		Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian	%	90	90	90
		Tingkat kepuasan terhadap layanan aset	%	70	75	80

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, Visi pembangunan Kota Padang Panjang adalah **"**Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat**"**.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota Padang Panjang serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan sesuai target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya nilai investasi
2	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja
3	Terselanggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk dapat meningkat dan tercapainya mutu pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak akan terlepas dari ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta kebulatan tekad (komitmen) Pemerintah Kota Padang Panjang dan Perangkat Daerah terkait selaku Tim Teknis didalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sangat diperlukan program dan kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah.
a. Penyediaan Jasa surat menyurat.
b. Penyediaan komponen dan jasa listrik, air dan komunikasi.
c. Penyediaan jasa umum kantor.
2. Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah.
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung.
b. Penyediaan bahan logistik kantor.
c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan.
d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
e. Penataan arsip dinamis pada SKPD.
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
B. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja.
1. Pelaksanaan pelatihan berbasis unit kompetensi.
a. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
b. Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sector swasta untuk penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
C. Program Penempatan Tenaga Kerja.
1. Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota.
a. Perluasan kesempatan kerja.
D. Program Hubungan Industrial.
1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasidalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
a. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kereja serta pengupahan.
2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota.

a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

E. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

a. Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota.

F. Program Pelayanan Penanaman Modal.

1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

a. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Tabel 3. 7

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

ode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**5.789.992.647**					**5.789.992.647**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.789.992.647**					**5.789.992.647**
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5.589.992.197**					**5.589.992.197**
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhanpemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	3.844.871.197				100%	3.844.871.197
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrassi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	2.920.701.197				100%	2.920.701.197
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	336 Orang/bulan	2.920.701.197	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	2.920.701.197
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	-				100%	-
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	306.000.000				100%	306.000.000
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Paket	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.000.000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Paket	34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	24 Laporan	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	220.000.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	10.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	20.000.000				100%	20.000.000
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	2 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipenuhi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	433.000.000				100%	433.000.000
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000

ode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	48 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	50.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Laporan	380.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	380.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	165.170.000				100%	165.170.000
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	113.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	113.000.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Unit	32.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	32.170.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,40%	297.000.000			0,48%	0,40%	297.000.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	297.000.000			100%	100%	297.000.000
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	162.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pengiriman berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	162.000.000
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pelatihan bahasa jepang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	135.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,08%	290.000.000				0,12%	275.000.000
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	175.000.000				100%	175.000.000
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persiapan siswa SMK memasuki dunia kerja dan analisis pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	25.000.000
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	uang saku peserta magang (10 bulan) dan penempatan naker di lokasi magang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	150.000.000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi pasar kerja		100%	115.000.000				100%	115.000.000
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	115.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	115.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	Kota Padang Panjang, Padang	32%	1.158.121.000				32%	1.158.121.000

ode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
							Panjang Barat, Silaing Bawah							
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	1.158.121.000				100%	1.158.121.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8000 Orang	1.158.121.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	premi sektor informal ketenagakerja a 10 bulan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	1.158.121.000
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**200.000.450**					**200.000.450**
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12%	75.000.450				14%	75.000.450
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	75.000.450				100%	75.000.450
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pembuatan kajian potensi investasi dan DED potensi investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.450
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi per tahun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	35.000.000.00000	75.000.000				37.000.000.00000	75.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	2 dokumen	75.000.000				2 dokumen	75.000.000
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	temu bisnis dengan calon investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	96,88%	50.000.000				96,88%	50.000.000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbutan izin yang diekluarkan sesuai SOP	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	50.000.000				100%	50.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Pelaku Usaha	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sosialisasi kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	15.000.000
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Pelaku Usaha	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sosalisasi melalui media elektronik seperti radio, medsos	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	10.000.000
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan Usaha	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	25.000.000
								TOTAL	**5.789.992.647**					**5.789.992.647**

Keterangan Tabel :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk tahun Anggaran 2025 memiliki 7 program kegiatan dengan total anggaran 5.789.992.647,-.
2. Dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan terdapat perbedaan anggaran dengan RKPD Kota Padang Panjang dikarenakan pagu indikatif sementara serta fluktuasi kenaikan satuan biaya pemerintah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada DPMPTSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Padang Panjang 2024-2026

ode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**5.789.992.647**					**5.789.992.647**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.789.992.647**					**5.789.992.647**
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**5.589.992.197**					**5.589.992.197**
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhanpemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	3.844.871.197				100%	3.844.871.197
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrassi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	2.920.701.197				100%	2.920.701.197
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	336 Orang/bulan	2.920.701.197	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	2.920.701.197
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	-				100%	-
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	306.000.000				100%	306.000.000
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Paket	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.000.000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Paket	34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	24 Laporan	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	220.000.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	10.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	20.000.000				100%	20.000.000
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	2 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipenuhi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	433.000.000				100%	433.000.000
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Padang	48 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	48 Laporan	50.000.000

ode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
						yang Disediakan	Panjang Barat, Silaing Bawah			Alokasi Umum		Listrik yang Disediakan		
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Laporan	380.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	380.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	165.170.000				100%	165.170.000
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	113.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	113.000.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Unit	32.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	32.170.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,40%	297.000.000			0,48%	0,40%	297.000.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	297.000.000			100%	100%	297.000.000
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	162.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pengiriman berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	162.000.000
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pelatihan bahasa jepang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	135.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	0,08%	290.000.000				0,12%	275.000.000
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	175.000.000				100%	175.000.000
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persiapan siswa SMK memasuki dunia kerja dan analisis pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	25.000.000
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	uang saku peserta magang (10 bulan) dan penempatan naker di lokasi magang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	150.000.000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi pasar kerja		100%	115.000.000				100%	115.000.000
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	115.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	115.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	32%	1.158.121.000				32%	1.158.121.000

ode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
												Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	1.158.121.000				100%	1.158.121.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8000 Orang	1.158.121.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	premi sektor informal ketenagakerja a 10 bulan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	1.158.121.000
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**200.000.450**					**200.000.450**
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12%	75.000.450				14%	75.000.450
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	75.000.450				100%	75.000.450
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha kabupaten / kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pembuatan kajian potensi investasi dan DED potensi investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.000.450
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi per tahun	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	35.000.000.00000	75.000.000				37.000.000.00000	75.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	2 dokumen	75.000.000				2 dokumen	75.000.000
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	temu bisnis dengan calon investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	96,88%	50.000.000				96,88%	50.000.000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbutan izin yang diekluarkan sesuai SOP	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	50.000.000				100%	50.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Pelaku Usaha	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sosialisasi kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	15.000.000
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Pelaku Usaha	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sosalisasi melalui media elektronik seperti radio, medsos	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	10.000.000
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan Usaha	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	25.000.000
								TOTAL	**5.789.992.647**					**5.789.992.647**

Keterangan Tabel:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 disusun berdasarkan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator pengukurannya. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2024-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 100%.
2. Tujuan Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 96,87, 96,88, 96,89.
3. Tujuan Menurunkan tingkat pengangguran dengan sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja memiliki 2 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 0,32%, 0,40%, dan 0,48% serta Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 0,04%, 0,08%, dan 0,12%.
4. Tujuan Menurunkan Angka Kemiskinan dengan sasaran Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin dengan Program Hubungan Industrial dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 32%.
5. Tujuan Meningkatkan nilai investasi dengan sasaran meningkatnya peluang investasi memiliki 2 program yakni Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2025-2026 yakni 12% dan 14% serta Program Promosi Penanaman Modal dengan target secara berturut dari tahun 2024-2026 yakni 35.000.000.000, 37.000.000.000 dan 87.000.000.000.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan harapan dapat mengakomodir semua kebutuhan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan serta tercapainya Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sangat tergantung kepada komitmen dan keseriusan segenap unsur dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola Sumber Daya Manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal Tahun 2025 seluruh kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat dipenuhi.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun, dengan harapan kiranya akan mampu meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA,SSTP,M.M
Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002